

Kajian Efektivitas Program RASKIN di Jawa Timur

Sudiarso

Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
Jl. Mayjen Haryono 169, Lowokwaru, Malang 65145, Jawa Timur

Naskah diterima : 02 Januari 2012

Revisi Pertama : 26 Januari 2012

Revisi Terakhir : 15 Februari 2012

ABSTRAK

Dalam upaya optimalisasi dan meningkatkan keberhasilan program RASKIN untuk dapat memenuhi hak pangan Rumah Tangga Miskin (RTM), maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh melalui kajian efektivitas program RASKIN. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan program RASKIN, kemungkinan kenaikan harga tebus RASKIN serta kelayakan kenaikan jumlah kuantum RASKIN yang diterimakan kepada RTM. Hasil Kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan program RASKIN di Jawa Timur secara umum berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari ketepatan pelaksanaan yang mencapai 81,9 persen. Kontribusi ketepatan tertinggi diperoleh dari ketepatan administrasi, kualitas, sasaran, waktu, dan harga masing-masing sebesar 94 persen, 84,3 persen, 83 persen, 80 persen, serta 78,3 persen. Sementara itu ketepatan jumlah nilai efektivitasnya paling rendah yaitu hanya sebesar 68 persen. Jumlah kuantum RASKIN yang diterimakan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) perlu dipertimbangkan untuk dinaikkan. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa jumlah kuantum RASKIN setiap bulan adalah 50 persen dari kebutuhan konsumsi beras yaitu sebesar 20 kg untuk setiap RTS. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa masyarakat menyadari adanya kemungkinan kenaikan harga tebus RASKIN, namun diharapkan tidak lebih dari Rp 2.500/kg.

kata kunci: RASKIN, efektivitas, RTS

ABSTRACT

In order to optimize and enhance the achievement of RASKIN (Rice for Poor People) program to fulfill food rights for Underprivileged Family (Rumah Tangga Miskin = RTM), it is necessary to perform a comprehensive evaluation through a study on the effectiveness of RASKIN program. This study aims to provide precise information about the outlook of the society toward RASKIN program implementation, the response of RTM on the possibility of increasing RASKIN price and the feasibility of total quantity of RASKIN received by RTM. The result shows that the RASKIN program in East Java is generally implemented well. It can be shown by the suitability of the score of the implementation of the RASKIN that reaches up to 81.9 percent. The highest suitability of implementation is contributed by the precision of the administration, quality, object, time, and price at 94 percent, 84.3 percent, 83 percent, 80 percent, and 78.3 percent, respectively. Meanwhile, the lowest total value of the effectiveness is only 68 percent. The quantum total of RASKIN received by Rumah Tangga Sasaran (RTS) is needed to be raised. Based on this study, it can be concluded that the total quantity of RASKIN per month is 50 percent of the rice consumption i.e. 20 kg per RTS. This study also shows that the

society is aware of Raskin price, but it is expected that the price is not more than Rp 2.500/kg.

keywords: RASKIN, effectivity, and RTS

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa "orang miskin dan anak-anak terlantar adalah tanggung jawab Negara". Sehubungan dengan amanat UUD 1945 tersebut, pemerintah meluncurkan program RASKIN yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang termiskin dan rawan pangan agar mereka tetap mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. RASKIN (beras untuk rakyat miskin) pada dasarnya diberikan pada keluarga miskin yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atas pangan keluarganya meski mereka telah bekerja keras. RASKIN adalah salah satu usaha pemerintah untuk memberikan jaminan sosial masyarakat yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Keluarga yang berhak mendapat RASKIN hanya mereka yang tergolong paling miskin dan rawan pangan. Jadi, RASKIN adalah hak masyarakat termiskin yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, atau orang-orang yang memang lemah yang tidak mampu bekerja sehingga perlu untuk diberi bantuan (Anonymous, 2011).

Selama sepuluh tahun pelaksanaan program, masih dijumpai kultur sebagian masyarakat yang menganggap bahwa program RASKIN merupakan hibah pemerintah yang diperuntukkan bagi semua kelompok masyarakat sehingga tidak jarang pembagian RASKIN di beberapa daerah menggunakan sistem bagi rata pada semua kelompok masyarakat. Meskipun ada beberapa kelemahan dalam operasionalnya, berdasarkan hasil kajian selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa program RASKIN masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat terutama

kalau dikaitkan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Timur (Sudiarso, B. Setiawan, dan B.T. Raharjo, 2007). Pada kondisi tertentu terutama pada musim paceklik di pedesaan masih dijumpai golongan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan tidak mempunyai akses untuk mendapatkan beras, karena tiadanya sumber pendapatan (Tabor dan Sawit, 2006).

Hasil kajian pelaksanaan program RASKIN di Jawa Timur pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Raskin rata-rata mencapai 76 persen, terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2006 yang hanya mencapai 73 persen. Kontribusi ketepatan tertinggi diperoleh dari ketepatan kualitas, administrasi, dan sasaran, masing-masing sebesar 85,8 persen, 85 persen, serta 82,4 persen. Sedangkan kontribusi terendah dalam penilaian ketepatan berasal dari ketepatan jumlah dan harga masing-masing sebesar 42 persen dan 67,67 persen. Rendahnya ketidak tepatan dalam jumlah disebabkan adanya pemerataan pembagian Raskin. Ketidak tepatan harga disebabkan tidak tersedianya biaya operasional dalam pendistribusian Raskin (Sudiarso, B. Setiawan, dan B.T. Raharjo, 2007).

Selama dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 dan 2011, pemerintah telah menetapkan pagu RASKIN sebesar 3.147.841 ton yang diperuntukkan bagi 17.488.007 Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia dengan alokasi 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600/kg. Sementara itu untuk Propinsi Jawa Timur telah ditetapkan pagu RASKIN sebanyak 554.367.960 kg selama setahun yang diperuntukkan bagi 3.079.822 RTS berdasarkan data Rumah Tangga Miskin yang telah dirilis oleh BPS pada tahun 2008 (Anonymous, 2010; BPS, 2008).

Dalam upaya optimalisasi dan meningkatkan keberhasilan program Raskin untuk dapat memenuhi hak pangan Rumah Tangga Miskin dan persiapan Raskin pada masa mendatang, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh melalui kajian program Raskin khususnya dari aspek peningkatan keefektifan program Raskin. Kajian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan data yang akurat tentang penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan program Raskin serta rencana kenaikan harga tebus Raskin serta kelayakan kenaikan jumlah RASKIN yang diterima kepada Rumah Tangga Miskin.

1.2. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai pada kajian efektivitas program Raskin ini adalah : (i) Mengkaji efektivitas program RASKIN khususnya dalam hal ketepatan tujuan program (ketepatan sasaran, waktu, jumlah, kualitas, administrasi, dan harga); (ii) Mengkaji kemungkinan peningkatan jumlah kuantum RASKIN yang diterima kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS); dan (iii) Mengkaji kemungkinan kenaikan harga tebus RASKIN oleh Penerima Manfaat.

1.3. Sasaran

Pertama, diperoleh informasi tentang efektivitas pelaksanaan program RASKIN berkenaan dengan tujuan program khususnya di Jawa Timur. Kedua, menentukan kelayakan kemungkinan peningkatan jumlah kuantum RASKIN yang diterima kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Ketiga, menentukan kelayakan kenaikan harga tebus Raskin oleh penerima manfaat dengan alternatif harga Rp. 2.000,-/kg; Rp. 2.250,-/kg; dan 2.500,-/kg.

1.4. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Kajian Efektivitas Program RASKIN meliputi : (i) survey lapangan yang ditujukan untuk melihat dan menilai kelemahan-kelemahan pelaksanaan program, sebagai bahan rekomendasi lanjutan pelaksanaan program berikutnya; (ii) mengkaji kemungkinan penambahan jumlah kuantum

RASKIN yang diterima kepada Rumah Tangga Miskin (RTM); dan (iii) mengkaji kemungkinan peningkatan harga tebus RASKIN oleh Penerima Manfaat tahun 2012.

II. METODE KAJIAN

2.1. Lokasi Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan survei, observasi, dan penelaahan pustaka. Kajian dilakukan di Wilayah Kabupaten dan Kota Malang, serta di Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dengan mengamati dan menggali data tentang pelaksanaan program RASKIN di daerah-daerah yang telah ditentukan. Selain ketiga lokasi tersebut, dikaji pula hasil penelitian sebelumnya di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro, Madiun, dan Sampang yang dilakukan pada tahun 2007.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Kajian pelaksanaan program RASKIN ini didasarkan pada pendekatan survei. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah daerah, Sub Divre, pemerintah kecamatan, maupun propinsi di Jawa Timur. Data primer diperoleh dari wawancara dengan panduan kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Responden yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program RASKIN, yaitu aparat pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa); BULOG Divre Jatim dan Sub Divre, serta BPS.

Jumlah responden yang diambil adalah 10 (Sepuluh) orang penerima RASKIN, 1 orang pemerintah desa, serta 1 orang tokoh masyarakat dari masing-masing desa contoh, sehingga total responden berjumlah 144 orang.

2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan model interaktif berupa siklus. Disamping itu juga analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam model analisis ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Marimin, 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pagu RASKIN Propinsi Jawa Timur

Selama dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 dan 2011, untuk propinsi Jawa Timur telah ditetapkan pagu RASKIN sebanyak 554.367.960 kg selama setahun yang diperuntukkan bagi 3.079.822 RTS berdasarkan data Rumah Tangga Miskin yang telah dirilis oleh BPS pada tahun 2008. Sementara itu, secara nasional pemerintah telah menetapkan pagu RASKIN sebesar 3.147.841 ton yang diperuntukkan bagi 17.488.007 Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia dengan alokasi 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600/kg.

3.2. Evaluasi dan Optimalisasi Program RASKIN

Dari hasil perhitungan ketepatan pelaksanaan RASKIN di masing-masing wilayah terlihat bahwa di Kabupaten Malang dan Kota Malang menunjukkan bahwa persentase ketepatan jumlah yang paling rendah yaitu Kabupaten Malang 67 persen dan Kota Malang 73 persen. Sedangkan di Kota Batu relatif bagus yaitu 75 persen. Hal

tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Malang dan Kota Malang pembagian dengan sistem pemerataan lebih besar.

Nilai tertinggi yang memberikan kontribusi pada tingkat efektivitas di Kabupaten Malang adalah ketepatan administrasi kemudian disusul ketepatan sasaran, harga, serta kualitas. Ketepatan administrasi didukung oleh ketatnya sistem pembayaran baik dari penerima ke titik distribusi maupun dari titik distribusi ke BULOG. Hal ini yang juga berpengaruh pada nilai ketepatan waktu. Kondisi serupa secara umum juga terjadi di Kota Malang dan Kota Batu yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil kajian terhadap indikator keberhasilan pelaksanaan program RASKIN di 3 wilayah sampel, disimpulkan bahwa pelaksanaan RASKIN Jawa Timur secara umum berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari ketepatan pelaksanaan yang mencapai 81,9 persen. Kontribusi ketepatan tertinggi diperoleh dari ketepatan administrasi, kualitas, sasaran, waktu, dan harga masing-masing sebesar 94 persen, 84 persen, 83 persen, 80 persen, serta 78,3 persen.

Tabel 1. Evaluasi Ketepatan Pelaksanaan RASKIN di Jawa Timur

No.	Indikator	Kab. Malang		Kota Malang		Kota Batu		Rerata	
		2007	2011	2007	2011	2007	2011	2007	2011
1.	Ketepatan Sasaran	85,7%	86%	85,1%	88%	82,7%	75%	84,5%	83%
2.	Ketepatan Jumlah	43%	67%	64%	68%	65%	70%	57,3%	68%
3.	Ketepatan Waktu	75%	77%	79%	80%	80,5%	83%	78,2%	80%
4.	Ketepatan Harga	73%	85%	85%	75%	75%	75%	77,7%	78,3%
5.	Ketepatan Kualitas	90%	85%	85%	85%	86,5%	83%	87,2%	84,3%
6.	Ketepatan Administrasi	90%	92%	85%	96%	78%	94%	84,3%	94%
Rerata		456%	492%	483%	497%	468%	485%	469%	491%
		76%	82%	80,5%	82%	78%	80%	78,2%	81,9%

Sumber: Data Kajian (diolah) 2011.

Sementara itu ketepatan jumlah hanya sebesar 68 persen.

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat meskipun secara umum tingkat efektifitas pelaksanaan RASKIN di Jawa Timur naik, kenaikan tertinggi adalah Kabupaten Malang sebesar 6 persen, sedangkan kenaikan efektifitas program RASKIN di Kota Malang dan Kota Batu masing-masing sebesar 2,3 persen dan 1,2 persen. Nilai efektifitas Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu masing-masing sebesar 82 persen, 82 persen dan 80 persen.

Hasil kajian tersebut ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan hasil kajian di tiga Kabupaten di Jawa Timur yang dilakukan pada tahun 2007. Berdasarkan pedoman umum

(Pedum), untuk mengetahui tingkat efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program RASKIN dilihat dari 6 indikator (Anonymous, 2011). Untuk meningkatkan obyektivitas penilaian tiap-tiap indikator dilihat berdasarkan variabel yang sesuai. Untuk ketepatan sasaran, variabel yang dijadikan pertimbangan antara lain: (V1) Variabel kontribusi RASKIN untuk memenuhi kebutuhan pangan, (V2) Penghasilan, (V3) Efektifitas mudes untuk penentuan penerima manfaat, dan (V4) Jumlah anggota keluarga.

Berdasarkan hasil survey, dapat dihitung tingkat efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program RASKIN di masing-masing Kabupaten contoh sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, 3, dan 4 sebagai berikut.

Tabel 2. Pengukuran Ketepatan Efektivitas Program RASKIN di Kab. Madiun

No.	Indikator	Indikator				Rerata
		V 1	V 2	V 3	V 4	
1.	Ketepatan Sasaran	85%	90%	85%	85%	86%
2.	Ketepatan Jumlah					60%
3.	Ketepatan Waktu	52%	85%	95%		77%
4.	Ketepatan Harga					74%
5.	Ketepatan Kualitas					85%
6.	Ketepatan Admin	95%	83%			89%

Tabel 3. Pengukuran Ketepatan Efektivitas Program RASKIN di Kab. Bojonegoro

No.	Indikator	Indikator				Rerata
		V 1	V 2	V 3	V 4	
1.	Ketepatan Sasaran	75%	85%	88%	89%	84%
2.	Ketepatan Jumlah					63%
3.	Ketepatan Waktu	87%	70%	89%		82%
4.	Ketepatan Harga					75%
5.	Ketepatan Kualitas					85%
6.	Ketepatan Admin	93%	91%			92%

Tabel 4. Pengukuran Ketepatan Efektivitas Program RASKIN di Kab. Sampang

No.	Indikator	Indikator				Rerata
		V 1	V 2	V 3	V 4	
1.	Ketepatan Sasaran	80%	80%	90%	50%	75%
2.	Ketepatan Jumlah					65%
3.	Ketepatan Waktu	75%	85%	86%		82%
4.	Ketepatan Harga					75%
5.	Ketepatan Kualitas					83%
6.	Ketepatan Admin	90%	92%			91%

Hasil perhitungan ketepatan pelaksanaan program di masing-masing Kabupaten terlihat bahwa Kabupaten Madiun dan Bojonegoro memiliki persentase ketepatan jumlah yang paling rendah yaitu Madiun 60 persen dan Bojonegoro 63 persen. Sedangkan di Kabupaten Sampang relatif bagus yaitu 65 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Madiun dan Bojonegoro pembagian dengan sistem bagi rata persentasenya lebih besar dibandingkan di Kabupaten Sampang.

Nilai tertinggi yang memberikan kontribusi pada tingkat efektivitas di Kabupaten Madiun adalah ketepatan administrasi kemudian disusul ketepatan sasaran, harga, serta kualitas. Ketepatan administrasi di dukung oleh ketatnya sistem pembayaran baik dari penerima manfaat ke petugas di tingkat Desa maupun dari petugas di tingkat Desa ke petugas BULOG.

3.3. Evaluasi dan Rekomendasi Penentuan Sasaran Penerima Manfaat

Ketepatan sasaran RASKIN merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian tujuan program. Ketidaktepatan terhadap sasaran penerima manfaat akan mengakibatkan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras menjadi tidak tercapai.

Hasil kajian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran pelaksanaan RASKIN di Jawa Timur sudah cukup baik, yaitu naik dari 82,54 persen pada tahun 2006 menjadi 83 persen pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2011 ketepatan sasaran sebesar 83 persen. Ketepatan sasaran tersebut dilihat dari pendapatan yang dihasilkan keluarga setiap bulan, pelaksanaan mudes dalam penentuan sasaran, jumlah anggota keluarga, serta kontribusi RASKIN bagi pemenuhan kebutuhan pangan responden. Penerima sasaran RASKIN dinilai tepat apabila pendapatannya kurang dari Rp. 350.000,- serta telah menjalankan mudes sebelum pelaksanaan.

Faktor penentu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam meningkatkan ketepatan sasaran RASKIN adalah optimalisasi peran musyawarah desa dalam penentuan penerima manfaat. Perangkat desa serta petugas RASKIN perlu memperoleh pengetahuan yang benar tentang peran, fungsi, serta prosedur untuk melaksanakan mudes.

Musyawarah desa hendaknya dapat menjadi faktor yang penting dalam penetapan siapa RTM yang akan menjadi penerima manfaat berdasarkan verifikasi data BPS, Verifikasi data RTM dilakukan oleh aparat pada level terbawah (RT/RW). Untuk mengawal pelaksanaan proses musyawarah diperlukan pendamping serta petugas dari tingkat kecamatan yang bertugas memberikan pemahaman terhadap, prosedur yang harus dilalui, pertimbangan mana yang dapat dilakukan serta memang menjadi larangan dalam pelaksanaan program RASKIN.

3.4. Evaluasi Ketepatan Jumlah

Jumlah RASKIN yang diterima pada penerima manfaat sebagian besar sudah tepat artinya berada di rentang 10 - 15 kg dibandingkan yang kurang dari 10 kg atau rata-rata berkisar antara 7,5 kg. Namun karena masih adanya pembagian diluar DPM yang telah ditetapkan menyebabkan tingkat ketepatan jumlah RASKIN kurang begitu bagus yaitu 71,7 persen. Hal tersebut disebabkan karena pagu yang ditetapkan tidak dapat memenuhi jumlah RTM yang seharusnya menjadi sasaran, sehingga masyarakat menuntut agar RASKIN dibagi tidak hanya pada RTM yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Temuan lain juga menunjukkan bahwa RASKIN ada yang digunakan untuk mengganti/menutup biaya operasional dari petugas maupun pelaksanaan kegiatan lain misalnya mudes karena tidak adanya alokasi khusus untuk pelaksanaan.

Berdasarkan kondisi tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan yaitu: (i) perlunya kepastian hukum dari pemerintah tentang pagu yang ditetapkan agar

didasarkan pada jumlah RTM sasaran, minimal dengan menggunakan referensi data BPS; (ii) diperlukan penambahan pedoman yang lebih tegas pada Pedum terhadap keterlibatan Pemerintah Daerah, baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk ikut berbagi (sharing) dengan alokasi tertentu terhadap selisih pagu yang tidak bisa dipenuhi dari pemerintah pusat, maupun untuk biaya operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan RASKIN di masing-masing tingkatan; dan (iii) peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat serta pendampingan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat terutama yang sudah mampu agar tidak ikut meminta jatah RASKIN.

3.5. Evaluasi Ketepatan Waktu

Ditinjau dari ketepatan waktu menunjukkan bahwa waktu pendistribusian dari Gudang BULOG ke desa oleh satker sudah tepat waktu. Pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa distribusi beras RASKIN baik dari gudang Perum BULOG sampai ke titik distribusi di desa maupun dari titik distribusi sampai ke lokasi (Dukuh/ RT) relatif telah berjalan cukup lancar. Kondisi beras yang khusus dialokasikan untuk RASKIN juga sudah siap untuk didistribusikan.

Ketepatan waktu penyaluran RASKIN secara umum sudah cukup baik yaitu sebesar 80 persen. Peningkatan ketepatan waktu ini didorong oleh kelancaran mekanisme pembayaran cash and carry sehingga akan mengurangi tunggakan. Disamping itu apabila terjadi tunggakan sudah mulai ada dukungan dari pemerintah daerah untuk menalangi sementara agar tidak menghambat pendistribusian bulan berikutnya.

Sedangkan ketepatan pendistribusian dari petugas RASKIN di tingkat desa/ kelurahan ke RTM penerima manfaat relatif sudah berjalan baik. Data kajian menunjukkan bahwa sudah jarang terjadi antrian dan bahkan RASKIN langsung terdistribusi. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar desa menyalurkan RASKIN dengan melibatkan RT

sehingga mudah dalam pendistribusian serta jarak dari titik distribusi ke tempat tinggal RTM pun juga relatif dekat yaitu sebagian besar kurang dari 700 m. Kedekatan tersebut memberikan kontribusi cukup besar bagi ketepatan waktu penyaluran.

3.6. Evaluasi Ketepatan Harga

Berdasarkan ketepatan harga menunjukkan bahwa pelaksanaan RASKIN sudah cukup efektif, dengan tingkat efektifitas mencapai 74 persen. Responden menyatakan membayar dengan tepat disebabkan adanya aturan dari pemerintah desa penerima dapat mengambil RASKIN hanya dengan cash and carry. Namun masih dijumpai untuk dapat menebus RASKIN RTM meminjam pada orang lain untuk selanjutnya dibayar langsung dengan menggunakan RASKIN. Oleh karena itu diperlukan kebijakan tertentu misalkan sinergi antar program sehingga RTM dapat menebus RASKIN dengan tenaga sehingga manfaatnya benar-benar dapat lebih terasa.

Mengenai harga tebus RASKIN perlu dipertimbangkan adanya kenaikan mengingat sejak empat tahun terakhir tidak pernah terjadi kenaikan harga tebus RASKIN, sementara harga pasar sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang saat ini sudah mencapai Rp. 7.000,- hingga Rp. 8.000,-. Harga RASKIN yang ideal adalah 30 – 40 persen dari harga pasar, artinya usulan harga RASKIN sebesar Rp. 2.000,- hingga Rp 2.500,-/kg cukup rasional.

3.7. Evaluasi Ketepatan Kualitas

Kualitas merupakan aspek yang sangat penting bagi pelaksanaan program RASKIN. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa ketepatan kualitas beras yang dikeluarkan BULOG sudah cukup bagus dengan tingkat keefektifan mencapai 84 persen, artinya hampir tidak ada temuan RASKIN yang kualitasnya di bawah standar. Komitmen dari Perum BULOG untuk mengganti jika ditemukan beras dengan kualitas dibawah standar merupakan kebijakan yang mendapatkan apresiasi.

Hanya saja dalam permasalahan kualitas, masih ada temuan di RTM misalkan ditemuinya beras kualitas jelek (bau, warna kuning, kutu dan menir) kadang masih dikeluhkan penerima manfaat. Walaupun Perum BULOG telah bersedia menampung keluhan tersebut, namun sejauh ini masyarakat belum banyak mendapat informasi untuk menyalurkan keluhan tersebut sehingga cenderung menerima saja. Sejauh ini BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) di tingkat Kabupaten/Kota belum banyak mensosialisasikan kepada masyarakat. Alasan yang dikemukakan adalah terbatasnya atau tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan ini merupakan kendala yang dihadapi oleh aparat yang menanganinya. Laporan yang ditujukan ke petugas di tingkat desa banyak kurang mendapat respon. Hal tersebut memperkuat pentingnya pendamping serta perlu lebih dioptimalkan lagi peran UPM.

3.8. Evaluasi Ketepatan Administrasi

Pelaksanaan program RASKIN, telah cukup baik jika dilihat dari ketepatan administrasi dengan tingkat efektivitas mencapai 94 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi untuk program RASKIN sudah relatif sederhana serta mampu dikerjakan oleh petugas. Disamping itu kesiapan tim pelaksana di titik distribusi dengan ujung tombak RT sudah cukup bagus sehingga menekan juga adanya tunggakan. Pembayaran uang tebusan dari desa ke BULOG juga menyumbang peningkatan tingkat ketepatan administrasi.

3.9. Pendapat Responden tentang Jumlah RASKIN

Dalam hal jumlah RASKIN yang diterima hampir semua responden mengharapkan adanya kenaikan. Beberapa responden menyatakan secara eksplisit peningkatan kuantitas RASKIN sebesar 20 kg/KK/bulan. Demikian juga dalam hal kualitas RASKIN, semua responden mengharapkan bahwa RASKIN yang diterima harus berkualitas baik. Sedangkan dalam waktu

penyaluran RASKIN hampir semua responden berpendapat hendaknya dilakukan setiap bulan. Sedangkan sebagian kecil lebih menekankan pada segi ketepatan waktu. Untuk mekanisme pembayaran semua responden tokoh masyarakat, pemerintah dan timlak desa sepakat dilakukan secara tunai. Sedangkan responden penerima manfaat ada 15 persen responden yang mengharap bahwa pembayaran RASKIN bisa diutang, sisanya secara tunai.

Mengenai alokasi jumlah RASKIN yang diterima kepada RTM, perlu dipertimbangkan penambahannya. Penambahan jumlah kuantum RASKIN ini diperlukan untuk memenuhi kecukupan gizi makro bagi keluarga yang betul-betul miskin. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS bahwa konsumsi beras bagi setiap orang rata-rata setiap tahun sebesar 128 kg/orang/tahun, maka setiap bulan diperlukan 42,8 kg untuk setiap RTM dengan 4 anggota keluarga. Dari perhitungan tersebut dan terbatasnya anggaran negara, maka jumlah yang rasional RASKIN setiap bulan adalah 50 persen dari kebutuhan yaitu sebesar 20 kg/RTS.

3.10. Pendapat Responden tentang Harga Tebus RASKIN

Harga tebus RASKIN mulai awal digulirkannya program sampai tahun 2007 tetap dipatok pada angka Rp. 1.000,-. Harga tebus RASKIN mulai dinaikan menjadi Rp. 1.600,- pada tahun 2008 hingga sekarang. Hal tersebut diputuskan sesuai dengan tujuan awal RASKIN untuk membantu masyarakat yang masuk kategori RTM untuk mencukupi kebutuhan pangan. Namun dengan semakin naiknya harga dasar gabah/beras ada beberapa pilihan sulit bagi pemerintah apabila harga tebus RASKIN tetap. (i) apabila kuota RTM yang mendapatkan alokasi RASKIN tetap maka subsidi akan berlipat; (ii) Dengan pagu subsidi tetap akan mengurangi jumlah RTM yang mendapat program RASKIN, namun akan menimbulkan konflik horisontal di masyarakat; dan (iii) Jumlah RTM yang mendapat RASKIN

tetap, tetapi jumlah kuantum RASKIN yang diberikan tiap RTM bisa berkurang, sehingga akan menjadikan program kurang efektif (dampak untuk mencukupi kebutuhan kurang terasa, padahal harapan RTM jumlah kuota ditingkatkan).

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah perlu memikirkan alternatif kenaikan harga RASKIN, tetapi dalam kisaran yang wajar sehingga tidak memberatkan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana respon masyarakat mengenai harga RASKIN yang tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2008, maka diperlukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh.

Pada umumnya responden dalam survey ini dapat memahami kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga tebus RASKIN di masa mendatang. Sebagian besar responden berpendapat bahwa penyesuaian harga tebus RASKIN adalah wajar, mengingat harga tebus RASKIN tidak pernah mengalami perubahan selama empat tahun terakhir. Persoalannya adalah pada tingkat harga berapa pemerintah harus menetapkan harga tersebut.

Masukan dari responden mengenai penetapan harga tebus RASKIN cukup bervariasi. Sebagian besar responden pemerintah desa (75 persen) mengusulkan patokan harga tebus RASKIN sebesar Rp 1.750/kg hingga Rp. 2.000,-. Sedangkan untuk responden penerima manfaat patokan harga Rp 1.750,-/kg merupakan pilihan yang paling banyak diusulkan yakni sebesar 45 persen. Dan untuk responden tokoh masyarakat sekitar 50 persen memberikan masukan kenaikan harga tebus kurang dari Rp 1.750,-/kg sisanya memberikan masukan antara Rp 1.850,-/kg – Rp 2.000,-/kg. Masukan yang cukup berbeda berasal dari timlak desa dimana 50 persen responden mengusulkan harga sebesar Rp 2.000/kg. Selain itu hasil survei juga menunjukkan adanya responden yang memberikan usulan agar harga tebus RASKIN tetap Rp 1.600/kg dengan persentase yang tidak begitu dominan.

Tanggapan responden atas pilihan tingkat harga tebus RASKIN 2012 jika harga tebus RASKIN dinaikkan cukup bervariasi. Hasil survey menunjukkan hampir semua responden bisa menerima harga Rp 1.750,-/kg dan keberatan dengan harga di atas Rp 2.500/kg. Tanggapan ini merupakan hal yang bersifat alamiah, sebagai seorang konsumen (pembeli) tentu akan selalu berupaya untuk memperoleh harga yang terendah. Tetapi yang menarik dari temuan ini bahwa persentase jumlah responden penerima manfaat yang bisa menerima kenaikan harga Rp 1.750,-/kg mencapai 90 persen. Indikasi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga sebesar Rp 1.750,-/kg tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Tanggapan positif dari responden terhadap kenaikan harga sebesar Rp 1.750,-/kg hingga Rp. 2.500,- harus diiringi dengan upaya untuk selalu meningkatkan pelaksanaan program RASKIN pada waktu yang akan datang. Hampir sebagian besar responden menuntut adanya peningkatan kuantitas dan kualitas RASKIN jika harga tebus RASKIN dinaikkan. Menurut responden kuantitas dan kualitas RASKIN yang diterima pemanfaat merupakan hal yang paling penting, dan ketidaktepatan dalam kedua hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program RASKIN.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pelaksanaan program RASKIN di Jawa Timur secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, tingkat Efektifitas RASKIN sudah cukup baik yaitu mencapai 81,9 persen. Indikator yang sudah efektif antara lain: ketepatan sasaran, kualitas, harga, serta administrasi, Indikator dengan kategori sedang adalah ketepatan waktu, sedangkan yang rendah adalah ketepatan jumlah yang hanya 68 persen.

Kedua, ketepatan sasaran pelaksanaan RASKIN di Jawa Timur sudah cukup baik, yaitu mencapai 83 persen. Ketepatan sasaran tersebut dilihat dari pendapatan yang dihasilkan keluarga setiap bulan serta pelaksanaan

mudes. Penerima sasaran RASKIN dinilai tepat apabila pendapatannya kurang dari Rp. 350.000,-/bulan serta telah menjalankan mudes sebelum pelaksanaan.

Ketiga, ketepatan waktu dapat mencapai 80 persen. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa distribusi beras RASKIN baik dari gudang Perum BULOG sampai ke titik distribusi di desa maupun dari titik distribusi sampai ke lokasi (Dukuh/RT) relatif telah berjalan cukup lancar. Keempat, ketepatan kualitas beras yang dikeluarkan BULOG mencapai 84,3 persen, artinya hampir tidak ada temuan RASKIN yang kualitasnya di bawah standar.

Kelima, ketepatan administrasi mencapai 94 persen, hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi untuk program RASKIN sudah relatif mampu dikerjakan oleh petugas serta didukung oleh semakin sedikit adanya kasus tunggakan. Permasalahan di administrasi adalah pada saat awal tahun pelaksanaan program.

Keenam, penerima RASKIN meskipun merupakan RTM yang membutuhkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi sebagian besar masih berusia produktif 25 – 50 tahun, sehingga perlu ada program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas serta kemandirian.

Ketujuh, implementasi dari penentuan RTS yang berasal dari data BPS Kabupaten tidak pernah dapat terlaksana untuk menentukan jumlah RTM penerima manfaat. Penentuan RTS lebih banyak didasarkan atas musyawarah desa, sehingga di banyak tempat RTS menerima RASKIN kurang dari 15 kg, rata-rata menerima 7,5 sampai dengan 10 kg.

Kedelapan, aparat Pemerintah Desa belum memiliki keberanian untuk membagi beras RASKIN sesuai dengan per RTM karena khawatir akan menimbulkan gejolak. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka kondisi pelaksanaan program RASKIN selama ini masih belum memenuhi tujuan substansialnya, yaitu penanggulangan kemiskinan melalui

pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin.

Kesembilan, meskipun relatif kecil, namun masih ditemukan RTM yang benar-benar tidak mampu membayar beras RASKIN sesuai harga yang ditetapkan. Termasuk dalam golongan ini adalah janda-janda tua yang tidak memiliki keluarga. Untuk menebus beras RASKIN mereka kemudian menjual "jatah" berasnya kepada orang yang dianggap mampu, dengan harga yang lebih tinggi. Bila hal ini ditinjau dari target subsidi, maka subsidi beras yang mestinya dinikmati oleh masyarakat miskin, sebagian juga dinikmati orang yang mampu.

Kesepuluh, tidak adanya kegiatan sebagai sumber pendapatan dalam bulan paceklik (5 bulan - 6 bulan dalam setahun), menyebabkan masyarakat yang paling miskin tidak mampu membeli RASKIN, baik dari harga maupun jumlah yang diterima sehingga program RASKIN yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat menjadi kurang efektif.

Kesebelas, jumlah kuantum RASKIN yang diterimakan kepada RTM perlu dipertimbangkan penambahannya. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS bahwa konsumsi beras bagi setiap orang rata-rata setiap tahun sebesar 128 kg/orang/tahun, maka setiap bulan diperlukan 42,8 kg untuk setiap RTM dengan 4 anggota keluarga. Dari perhitungan tersebut dan terbatasnya anggaran negara, maka jumlah yang rasional RASKIN setiap bulan adalah 50 persen dari kebutuhan yaitu sebesar 20 kg untuk setiap RTS.

Kedua belas, masyarakat dan pemangku kepentingan menyadari adanya kenaikan harga tebus RASKIN, namun diharapkan tidak lebih dari Rp. 2.500,-. Dalam rangka memperjelas kebijakan kenaikan harga maupun program RASKIN diharapkan dilakukan sosialisasi lebih intensif dengan melibatkan pendamping agar dapat meminimalisir adanya mispersepsi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2010. Alokasi Pagu Raskin 2010. Perum BULOG Divre Jawa Timur. Surabaya.
- Anonymous, 2011. Pedoman Umum RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin). Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008. Statistik Indonesia, Statistik Tahunan. BPS. Jakarta.
- Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sudiarso, B. Setiawan, dan B.T. Raharjo, 2007. Monitoring, Evaluasi, dan Update Hasil Pendampingan Program Raskin Melalui Quick Survey di Jawa Timur.
- Tabor, Steven R. dan M. Husein Sawit, 2006. Program Bantuan Natura Raskin dan OPK: Penilaian Makro. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Bulog. Jakarta

BIODATA PENULIS :

Sudiarso, dilahirkan di Sidoarjo tanggal 11 Mei 1957, menyelesaikan S1 Sarjana Pertanian di Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Sain Program Studi Biologi Lingkungan di Universitas Pascasarjana ITB Bandung, tahun 1986 dan S3 pada tahun 1999 Ilmu Hayati Program Pascasarjana di Universitas Airlangga dan saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya.